

# Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

## Daftar Isi

|                                                                                                                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Akuntabilitas Diskresi Birokrasi di Era Otonomi Daerah</b><br>Sri Juni Woro Astuti.....                                                                       | 85–94   |
| <b>Media Pers Lokal Melawan Korupsi</b><br>Dwiyanto Indiahono .....                                                                                              | 95–101  |
| <b>Model Penguatan Kapasitas Politik Anggota Legislatif Perempuan<br/>di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</b><br>Machya Astuti Dewi .....                     | 102–111 |
| <b>Kampanye Calon Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Sidoarjo<br/>pada Pemilu 2009</b><br>Wahidah Zein Br Siregar .....                                         | 112–118 |
| <b>Upaya Pengentasan Kemiskinan di Madura sebagai Model<br/>Pengembangan Tanggung Jawab Sosial</b><br>Ekna Satriyati dan Devi Rahayu.....                        | 119–129 |
| <b>Penyusunan Kebijakan <i>Partnership</i> dan <i>Development</i> dalam<br/>Pemanfaatan Dana BUMN untuk Pengembangan UKM</b><br>Priyono Tri Febrianto.....       | 130–138 |
| <b><i>Social Early Warning System</i> untuk Mengantisipasi Konflik Sosial<br/>di Masyarakat</b><br>Karnaji, Septi Ariadi, Soebagyo Adam, dan Siti Mas'udah ..... | 139–151 |
| <b>Kendala Pemerolehan Informasi Verbal Seputar <i>Issue Global Warming</i><br/>pada Masyarakat Tamping</b><br>Moch. Jalal .....                                 | 152–161 |
| <b>Study on Islamic Literature Viewed from Theosophical Perspective</b><br>Amir Fatah .....                                                                      | 162–167 |

# Model Penguatan Kapasitas Politik Anggota Legislatif Perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Machya Astuti Dewi<sup>1</sup>

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, UPN "Veteran", Yogyakarta

## ABSTRACT

*This paper describes that female parliament members in Yogyakarta province tend to be passive during parliament meetings. Some are lack of self-confidence to share and struggle for their ideas. This paper explores how of political education that the NGOs and political parties have done for improving women political capacity. This paper shows that almost all NGOs focused their programmes on women voter education, while the political parties focused on legal drafting and budgeting training. This paper suggests that there should be an alternative model for empowering the women legislators by stressing on communication skill, self confidence, women's issues, and networking.*

**Key words:** women, legislators, political education, political capacity, Yogya, Indonesia

Hasil penelitian yang telah pernah dilakukan oleh penulis pada tahun 2007–2008 menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cenderung belum berbuat banyak untuk kaumnya. Bahkan, ada anggota legislatif perempuan yang sangat jarang berbicara dalam rapat atau sidang. Kondisi ini dituturkan oleh para ketua Komisi dan saling silang pendapat di antara sesama anggota legislatif perempuan yang menyatakan bahwa sebagian besar anggota legislatif perempuan lebih banyak bersikap pasif, tidak banyak mengemukakan gagasan dan cenderung hanya mengikuti arah pembicaraan yang didominasi oleh anggota laki-laki.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab "membisunya" anggota legislatif perempuan dalam persidangan. Pertama, menilik dari sebaran latar belakang pendidikan terlihat tidak terlalu banyak anggota legislatif yang latar belakang pendidikannya berkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi mereka sebagai anggota legislatif. Tidaklah mengherankan jika dalam sidang-sidang DPRD anggota legislatif perempuan terlihat pasif, tidak banyak mengajukan pendapat dan usulan. Kurangnya keberanian untuk menyampaikan pendapat dan ditambah dengan minimnya pengetahuan bidang politik, sosial dan ekonomi menyebabkan anggota legislatif perempuan tidak banyak berbicara dalam sidang.

Kedua, pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik tidak memilah antara caleg perempuan dan laki-laki, padahal kebutuhan dan tantangan yang

dihadapi caleg laki-laki dan perempuan berbeda.

Ketiga, sikap anggota legislatif laki-laki yang sinis terhadap usulan program perempuan turut menghambat keberanian anggota legislatif perempuan untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Meskipun tidak semua anggota legislatif laki-laki bersikap demikian, suara sinis dan bernada mengejek tersebut membuat anggota legislatif perempuan menjadi enggan mengajukan usul, terutama yang berkaitan dengan persoalan perempuan.

Keempat, kurangnya kualitas dan kemampuan anggota perempuan dalam menyampaikan gagasan. Terlebih lagi jumlah anggota perempuan terlampau kecil dibandingkan laki-laki. Akibatnya suara perempuan seakan tidak terdengar di sidang-sidang. Persoalan kualitas personal anggota legislatif perempuan dalam menyampaikan usulan menjadi faktor penting yang menentukan apakah anggota laki-laki akan mendukung usulan anggota perempuan atau tidak.

Kelima, kurangnya rasa percaya diri para anggota legislatif perempuan. Di parlemen dominasi anggota laki-laki terlihat sangat dominan. Mereka berani berbicara secara keras dan tegas, meskipun tidak jarang substansi pembicaraan tidak terarah. Sikap keras dan tegas semacam itu yang tidak dimiliki oleh anggota legislatif perempuan, sehingga di tengah-tengah sidang legislatif suara mereka cenderung tenggelam, bahkan memilih tidak banyak bicara.

Keenam, kurangnya pemahaman mengenai isu perempuan. Sebagian besar anggota legislatif

<sup>1</sup> Korespondensi: M.A. Dewi, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. Babarsari 2 Yogyakarta, E-mail: machdewi@yahoo.com

perempuan belum sepenuhnya paham bahwa salah satu tugas mereka adalah memperjuangkan kepentingan perempuan. Kurangnya pemahaman tersebut menjadi salah satu sebab kurang terakomodirnya kepentingan perempuan di DPRD.

Ketujuh, sebagian besar anggota legislatif perempuan belum memanfaatkan media massa untuk menggali dukungan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. Padahal media massa merupakan salah satu media penting bagi anggota legislatif perempuan untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan (Dewi & Ilkodar 2008: 98–99).

Fenomena "membisunya" anggota legislatif perempuan beserta faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak banyak berbicara di sidang-sidang parlemen tersebut menggambarkan bahwa keterwakilan perempuan semata-mata belum menjamin terpenuhinya kepentingan perempuan. Untuk itu perlu dirumuskan strategi dan model untuk menguatkan kapasitas politik anggota legislatif perempuan, sehingga mereka mampu mengemban fungsi sebagai penyuar dan pejuang kepentingan perempuan. Dalam mengkaji fenomena tersebut, sajian akan diawali dengan eksplorasi model-model pendidikan politik untuk perempuan yang telah dilakukan oleh partai politik dan LSM perempuan. Sebagai pembandingan penulis kemudian akan melihat model-model pendidikan politik untuk perempuan yang pernah dilakukan di beberapa negara. Penyajian akan diakhiri dengan merumuskan model alternatif untuk memperkuat kapasitas politik anggota legislatif perempuan di provinsi DIY.

## Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif yang bersifat penelitian evaluasi karena berkaitan dengan eksplorasi dan evaluasi peran LSM dan organisasi perempuan, kebijakan partai dan peran pemerintah dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan. Hasil evaluasi menjadi acuan untuk merumuskan model peningkatan kapasitas politik anggota legislatif perempuan.

Penulis melakukan wawancara dengan para aktivis LSM atau organisasi perempuan untuk mengetahui program-program yang sudah mereka lakukan dalam memberdayakan perempuan secara politik dan pendekatan-pendekatan yang sudah mereka lakukan untuk memperkuat kemampuan perempuan berpolitik. Penulis juga melakukan studi dokumen dari modul-modul yang mereka buat untuk melihat muatan/materi pendidikan politik perempuan

yang mereka lakukan.

Penulis semula merencanakan mengadakan wawancara dengan para fungsionaris partai politik di DIY tempat asal anggota legislatif perempuan untuk mengetahui program-program partai dalam meningkatkan kemampuan anggota perempuan mereka di lembaga legislatif dalam berpolitik. Amat disayangkan kesibukan partai politik pasca pemilu 2009 menyebabkan wawancara tidak terlaksana. Sebagai gantinya penulis mengumpulkan data sekunder tentang pembekalan yang dilakukan partai-partai politik dari penelusuran data internet. Data ini dilengkapi dengan data hasil wawancara dengan para anggota legislatif perempuan periode 2004–2009 yang berasal dari fungsionaris partai politik.

Studi pustaka (kajian literatur) tentang strategi-strategi untuk memberdayakan perempuan di parlemen dilakukan pula sebagai bahan masukan dan komparasi untuk menyusun model. Data mengenai pemberdayaan politik untuk anggota legislatif perempuan di Georgia dan Afrika sangat membantu untuk merumuskan model alternatif. Sebagaimana diketahui beberapa negara di kawasan Afrika dikenal sebagai negara dengan jumlah representasi politik perempuan yang cukup tinggi.

Keseluruhan data tersebut disajikan dalam display data, kemudian direduksi mana yang relevan dan mana yang tidak dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk kemudian dibuat kategorisasi. Tahap berikutnya adalah membuat interpretasi dan kesimpulan hasil penelitian. Hasil dari penarikan kesimpulan diperoleh gambaran mengenai model-model pendidikan politik untuk perempuan (termasuk anggota legislatif perempuan) yang pernah dilakukan di provinsi DIY, di kota-kota lain di Indonesia dan di luar negeri. Kesimpulan mengenai model-model tersebut menjadi bahan untuk merumuskan model alternatif yang lebih sesuai untuk memperkuat kapasitas politik anggota legislatif perempuan di provinsi DIY.

## Hasil Penelitian

Partai politik merupakan salah satu agen yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik. Namun demikian tidak semua partai politik melaksanakan fungsi pendidikan politik dengan intens, terutama partai-partai kecil atau partai politik yang masih baru. Kebanyakan partai politik melakukan pendidikan politik (pembekalan) untuk caleg terpilih baik laki-laki maupun perempuan secara bersama-sama. Meskipun demikian bagi para caleg perempuan yang telah terpilih partai biasanya

akan bekerjasama dengan LSM yang menaruh minat pada program pemberdayaan perempuan dengan cara mengirimkan anggota legislatif perempuan untuk mengikuti pelatihan. Partai Golkar DIY misalnya, melakukan pendidikan politik untuk anggota perempuan bekerja sama dengan IRI. Salah satu materi yang pernah diberikan adalah mengenai strategi kemenangan pemilu. Dwi Astuti anggota DPRD Kota Yogyakarta 2004–2009 dari Partai Golkar yang pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan IRI menuturkan bahwa sebelumnya tidak pernah ada pendidikan politik untuk anggota legislatif perempuan. Dwi mengemukakan komentarnya mengenai pendidikan politik di Indonesia: "Di Indonesia pendidikan politik sangat kurang sekali. Pendidikan politik itu harusnya kan untuk siapa saja... Kebetulan Golkar di DIY itu kerja sama dengan IRI. Sekarang sering mengadakan pendidikan politik" (Wawancara dengan Dwi Astuti, 3 Juni 2008).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berdiri pada tahun 1998 dengan nama saat itu Partai Keadilan (PK) memulai pendidikan politik sejak awal mula partai berdiri. Salah seorang anggota legislatif perempuan dari DPRD Kota Yogyakarta, yaitu Anis Sri Lestari menuturkan: "Ada beberapa kali pembekalan dari partai. Materi utama adalah mengenai perlunya berjuang di partai politik. Pembekalan yang kedua sudah sampai pada materi bagaimana harus menang." Khusus bagi caleg perempuan PKS mengundang para caleg perempuan dari PKS seluruh Indonesia. Mereka diberikan pembekalan mengenai tugas-tugas sebagai anggota legislatif. Anis mengemukakan kembali pengalamannya:

Ada saat itu pembekalan bareng-bareng perempuan seluruh Indonesia dibagi regional. Garis besarnya pembekalan itu isinya bagaimana kita menjaring aspirasi, menyuarakan dalam parlemen. Yang memberikan materi ada dari media massa, kemudian caleg yang sudah jadi, tapi waktu itu yang memberikan laki-laki (Wawancara dengan Anis Sri Lestari, 30 Mei 2008).

Pengalaman Anis dibenarkan oleh Dewi Nuraini, anggota legislatif perempuan DPRD Kulonprogo dari PKS. Ia juga mendapatkan pembekalan untuk caleg dari PKS yang waktu itu dilakukan untuk seluruh caleg, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Sementara untuk pendidikan politik yang khusus terdiri dari kaum perempuan PKS mengadakan setahun sekali secara nasional dengan materi utama mengenai komunikasi politik dan materi-materi yang berkaitan dengan kebutuhan

perempuan:

Di awal ada pembekalan caleg. Itu laki perempuan. Kalau di tingkat wilayah itu pertemuannya dengan organisasi-organisasi kewanitaan itu kita *sharing*. Kemudian untuk pendidikan politik yang sekarang digagas oleh partai itu untuk semua. Kalau di tingkat pusat ada pertemuan berkala untuk caleg perempuan setahun sekali. Itu untuk peningkatan kapasitas kita. Materi apa yang kita inginkan itu kemudian diolah di pusat (DPP PKS). Materi yang diberikan biasanya tentang komunikasi politik, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan kaum perempuan itu sendiri. Kita juga diberi kuesioner atau ditelepon apa saja yang dibutuhkan. Yang memberi materi beragam, dari kita sendiri, juga pernah Smita (Wawancara dengan Dewi Nuraini, 23 Juli 2008).

Agaknya menjadi fenomena umum yang berlaku bagi semua partai politik di Indonesia bahwa dalam melakukan pendidikan politik kebanyakan partai tidak ada pemilahan antara caleg perempuan dan laki-laki. Demikian pula yang berlaku di Partai Amanat Nasional (PAN). Siti Majmu'ah anggota DPRD Kota Yogyakarta dari PAN menceritakan pengalamannya:

Di partai itu tidak dibedakan laki atau perempuan. Tapi ada pelatihan bagaimana fungsi dewan. Kalau yang berkaitan dengan perempuan dari partai juga ada LSM yang berkiprah untuk pendidikan politik perempuan. Itu dari IRI, kemudian di PAN itu ada organisasi perempuannya yang namanya Sekar Surya. Ada kegiatan pelatihan untuk perempuan. Saya beruntung waktu itu sedang hangat-hangatnya (Wawancara dengan Siti Majmu'ah, 20 Juni 2008).

Pola yang sama juga dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai tidak secara khusus melakukan pendidikan politik untuk perempuan PKB. Sumi Hadiyanah anggota DPRD Kulonprogo periode 2004–2009 menceritakan bagaimana sulitnya PKB mencari kader perempuan untuk menjadi pengurus. Hal ini berdampak tidak adanya pendidikan khusus untuk perempuan:

Tidak ada (pendidikan politik khusus untuk perempuan). Kalau pendidikan politik ya laki perempuan, tidak dibedakan. Kalau perempuan ya kita *ngadakan* sendiri. Itu kan ada PPKB (Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa). Ternyata ketika di situ kita cari perempuan untuk jadi pengurusnya sulit sekali. Maksudnya kalau sudah ada pengurusnya kita bisa mengadakan pendidikan politik untuk perempuan... Mungkin karena di PKB ya? Teman-teman itu memandang

politik tidak baik. Padahal kalau di ormas respeknya bagus. Misalnya yang *ngundang* Fatayat responnya bagus. Tapi ketika di politik itu sulitnya luar biasanya. Ya sudahlah. Kita buat kadernya person saja (Wawancara dengan Sumi Hadiyanah, 1 Agustus 2008).

Pengalaman Hadiyanah terasa kontras jika dibandingkan dengan upaya keras yang dilakukan para perempuan Nahdlatul Ulama/NU baik yang tergabung dalam Muslimat maupun Fatayat. Sejak diwacanakannya kuota keterwakilan perempuan pada Pemilu 2004 mereka berupaya keras melakukan sosialisasi kuota keterwakilan 30% kepada para pemilih perempuan melalui pendidikan politik dan dialog publik dengan para kandidat perempuan. Upaya ini mencerminkan betapa gigihnya perempuan Muslimat dan Fatayat mendorong agar kaum perempuan memilih perempuan (Siregar 2007: 325). Namun demikian sebagaimana dituturkan Hadiyanah upaya keras itu belum diimbangi oleh kekuatan dari kaum perempuan sendiri untuk masuk ke dunia politik bersedia menjadi caleg dan bersaing dengan laki-laki.

Dari pernyataan beberapa fungsionaris partai politik yang kemudian menjadi anggota legislatif perempuan tersebut terlihat bahwa partai politik kurang memiliki kepedulian terhadap kebutuhan politisi perempuan. Partai politik cenderung menyamaratakan materi pembekalan politik untuk para kadernya. Akibatnya kemampuan anggota legislatif perempuan menjadi tidak maksimal karena mereka membutuhkan kekuatan psikologis yang berbeda dengan laki-laki manakala berada di tengah-tengah anggota Dewan yang mayoritas adalah laki-laki. Penguatan secara psikologis inilah yang masih luput dari perhatian partai politik.

## Pendidikan Politik oleh LSM

Aktor lain yang secara aktif dan rutin mengadakan pendidikan politik untuk perempuan adalah LSM. Bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh LSM sangat beragam, antara lain seminar, workshop, penyebaran leaflet, penempelan poster, pelatihan dan penulisan di media massa serta penayangan di media elektronik.

Salah satu LSM yang intens mengadakan pendidikan politik untuk perempuan di Indonesia antara lain adalah International Republican Institute (IRI). IRI memiliki tujuan untuk mengembangkan pembangunan politik menuju negara yang demokratis semenjak jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Tujuan itu diwujudkan dengan cara mendukung

proses konsolidasi demokratik di Indonesia melalui penguatan lembaga pemerintahan, mendorong partai politik agar lebih memahami keinginan pemilih dengan baik dan mendorong peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik dan pemerintahan ([www.iri.org/asia/indonesia.asp](http://www.iri.org/asia/indonesia.asp), diakses 9 Juni 2009).

Berkait dengan program pendidikan politik untuk perempuan pada tahun 2002 International Republican Institute (IRI) mengadakan seminar dan diskusi mengenai pemberdayaan perempuan dan upaya meningkatkan jumlah perempuan di dunia politik. Langkah itu diikuti dengan pelatihan yang diikuti oleh 300 perempuan dari tujuh partai politik di Indonesia pada tahun 2003. Materi pelatihan disampaikan oleh Direktur program IRI di Indonesia, yaitu Tom Garrett dan beberapa staf lokal. Pada garis besarnya mereka memaparkan materi mengenai karakteristik kandidat yang sukses, cara membawa pesan untuk pemilih perempuan, dan cara memengaruhi kebijakan partai selama masa kampanye. Pada pelatihan itu juga dipaparkan perbandingan hambatan kultural dan struktural yang dihadapi perempuan Amerika Serikat dan negara-negara lain (<http://www.data%20penguatan%20keppol/2003-02-25-Indonesia,asp-iri.htm>, diakses 9 Juni 2009).

Pasca Pemilu 2004 IRI mengadakan pelatihan untuk anggota legislatif perempuan yang telah terpilih agar mereka memahami peran dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. IRI melakukan konperensi review pasca pemilu dan pelatihan politik. Dalam pelatihan itu IRI menghadirkan anggota Kongres Leslie Waters (dari Florida), Senator Mick Mines (Nebraska), anggota Kongres Kevin Del Gobbo (Connecticut) dan mantan senator Glenn Scott (Colorado). IRI juga bekerja sama dengan Internews, sebuah LSM yang mempromosikan media terbuka. Pelatihan gabungan itu difokuskan pada materi mengenai hubungan media massa dengan anggota legislatif dan strategi pemanfaatan media massa ([www.iri.org/asia/indonesia.asp](http://www.iri.org/asia/indonesia.asp), Diakses 9 Juni 2009).

Langkah nyata lain yang dilakukan IRI dalam mempromosikan partisipasi perempuan dalam politik adalah mengadakan program 2,5 tahun inisiatif politik untuk perempuan sejak Juli 2006. Program ini dirancang untuk memperluas partisipasi kandidat perempuan dalam pemilu 2009. Pelaksanaan program ini didukung oleh Biro Demokrasi, Hak asasi manusia dan buruh dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. IRI melakukan upaya penguatan partisipasi perempuan terutama di tingkatan partai politik grassroots dengan memberikan pelatihan

mengenai perempuan dan politik, demokrasi internal, pengembangan ketrampilan komunikasi dan kepemimpinan ([www.iri.org/asia/indonesia.asp](http://www.iri.org/asia/indonesia.asp), diakses 9 Juni 2009).

Lembaga yang juga aktif melakukan pendidikan politik untuk anggota legislatif perempuan adalah Asia Foundation. Lembaga ini pernah melakukan pelatihan yang diikuti 182 anggota legislatif perempuan DPRD provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. Materi yang diberikan adalah mengenai politik lokal, anggaran belanja yang responsif gender dan legal drafting ([asiafoundation.org/publications/pdf/263](http://asiafoundation.org/publications/pdf/263), Diakses 6 Mei 2009).

Dalam rangka mempersiapkan pemilu 2009 Asia Foundation bekerja sama dengan Pusat Studi Politik Universitas Indonesia, MISPI, Pusham Universitas Airlangga dan Lembaga Studi Kebijakan Publik melatih para calon anggota legislatif perempuan di 4 wilayah, yaitu Jakarta, Aceh, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Materi penting yang dibahas adalah seputar persiapan kandidat perempuan menghadapi kampanye, yaitu bagaimana mendapatkan pendukung, bagaimana mengembangkan strategi media yang efektif dan penjelasan mengenai sistem pemilu.

Salah satu sesi yang menarik dalam pelatihan tersebut adalah saat berdiskusi mengenai bagaimana cara membangun konstituen dan mengembangkan isu kampanye. Para caleg perempuan dilatih agar mampu mengartikulasikan diri mereka agar menjadi berbeda dengan yang lain (terutama laki-laki) dan bagaimana mereka dapat menarik segmen-segmen tertentu dari para pemilih. Substansi pelatihan juga difokuskan untuk mendorong kandidat mengembangkan platform politik agar menarik perhatian pemilih dan responsif dengan kebutuhan pemilih. Para kandidat perempuan juga dibekali pengetahuan agar dapat menggunakan media massa untuk "menjual" nama mereka. Bagi sebagian besar peserta pemanfaatan media massa merupakan hal yang baru dan belum dikembangkan. Setelah mengikuti pelatihan tersebut akhirnya peserta menjadi lebih paham mengenai cara bagaimana menggunakan media untuk membantu mereka mengartikulasikan dan menyebarluaskan pesan-pesan politik. Materi lain yang disampaikan kepada para kandidat perempuan adalah mengenai sistem penghitungan suara yang baru dan pengetahuan mengenai daerah pemilihan. Dalam pelatihan itu para caleg perempuan diberi simulasi tentang banyak hal dalam kampanye yang nantinya akan mereka temui dalam kampanye yang sesungguhnya ([www.asiafoundation.org/news/?p=327](http://www.asiafoundation.org/news/?p=327), Diakses 6 Mei 2009).

Perhatian pada pendidikan politik untuk perempuan tidak hanya dilakukan LSM internasional, tetapi juga LSM lokal di DIY. Salah satunya adalah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). KPI melakukan penguatan hak-hak perempuan melalui advokasi politik. Langkah ini gencar dilakukan terutama menjelang pemilu tahun 2004. Advokasi bertujuan untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik, mensosialisasikan arti penting keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan, mendesak pengambil keputusan di lembaga politik dan lembaga pemilu untuk mewujudkan keterwakilan perempuan, mempertajam analisis *affirmative action* hak politik perempuan (Laporan pertanggungjawaban KPI DIY, 2004: 8).

Untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam politik formal KPI DIY melakukan pendidikan politik tentang hak asasi perempuan yang dilaksanakan bekerja sama dengan Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta (SBPY). Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan haknya sebagai warga negara, meningkatkan kapasitas pemilih perempuan agar mampu mengambil keputusan secara rasional dan mandiri (bebas dari tekanan pihak luar), memberikan pemahaman kepada pemilih perempuan tentang arti penting memilih wakil perempuan dan implikasinya bagi perubahan tingkat kesejahteraan perempuan, memberikan pengetahuan praktis mengenai surat suara, tata cara pemberian suara dan simulasi pencoblosan.

Untuk mendukung terpilihnya wakil-wakil perempuan yang akan duduk dalam lembaga legislatif KPI DIY melakukan program memperkenalkan caleg-caleg perempuan kepada para pemilih perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan sejak Pebruari hingga April 2004. Pertemuan antara caleg perempuan dengan pemilih perempuan bertujuan untuk mendorong terjadinya kontrak sosial antara pemilih dan calon terpilih berupa tuntutan dan harapan pemilih kepada calon yang dipilih dan memberikan kesempatan calon yang akan dipilih untuk menginformasikan tentang peran dan posisinya serta visi dan misinya sebagai calon wakil rakyat, memfasilitasi pemilih dan calon yang akan dipilih untuk membangun dialog dan merumuskan kesepakatan-kesepakatan untuk pembaharuan tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, pelanggaran HAM dan kekerasan, memfasilitasi pemilih dan calon yang akan dipilih untuk menciptakan mekanisme; partisipasi rakyat, kontrol rakyat terhadap wakil rakyat dan akuntabilitas publik pasca

pemilu (Laporan pendidikan pemilih dan dialog politik temu caleg dan pemilih perempuan di DIY, Februari–Maret 2004).

Menjelang pemilu 2009 KPI DIY mengadakan pelatihan untuk para caleg perempuan dari wilayah DIY, Jawa Tengah dan Kalimantan. Selama pelatihan para caleg perempuan mendapatkan pengetahuan mengenai: (1) bagaimana membaca daerah pemilihan dengan perspektif gender, (2) peraturan pemilihan umum, (3) kalkulasi politik, (4) media dan komunikasi politik (Wawancara dengan Retno Agustin, 24 Juni 2009).

Pendidikan politik yang dilakukan secara komprehensif, melibatkan pemilih pemula, perempuan ibu rumah tangga, maupun perempuan yang siap bersaing dalam pemilu (caleg perempuan) dapat dijumpai dalam kegiatan yang dilakukan Sehati. Sejak tahun 2004 Sehati secara maraton dan kontinyu melakukan pendidikan politik untuk pemilih pemula dan perempuan.

Bagi para pemilih pemula kegiatan dilakukan dengan bentuk dialog sarasehan. Acara ini dilaksanakan di kecamatan Pakualaman, Bumijo dan Jetis kota Yogyakarta yang mendapat respons sangat bagus dari kaum remaja. Sementara itu bagi kelompok perempuan kegiatan pendidikan politik yang dilakukan Sehati memanfaatkan wadah PKK sebagai media untuk mengumpulkan perempuan. Sehati sengaja mendekati para pimpinan PKK untuk menggerakkan anggota perempuan agar mau datang. Kegiatan juga dikemas secara lebih menarik dengan cara melakukan role play (bermain peran) agar tidak membosankan para peserta yang hampir semuanya ibu rumah tangga dan tidak terbiasa mengikuti seminar/lokakarya. Dalam pertemuan ini Sehati juga mendorong kaum perempuan agar memilih wakil perempuan. Esti Susilarti dari Sehati menuturkan:

Kita lewat PKK. Pegang aja berapa kecamatan kita ngumpulkan kita sampai pada simulasi pemilihannya, nyontrengnya. Sampai pada model bagaimana seorang ibu harus mendidik anaknya sekalipun masih kecil-kecil bahwa politik itu penting, tidak boleh ditinggalkan. Itu ada modelnya dan diperagakan. Ada pentingnya memilih perempuan dengan suatu pemahaman logika bahwa puitika perempuan itu yang tahu perempuan. Mestruasi yang tahu ya perempuan, yang merasakan perempuan. Yang akan mengerti sebenar-benarnya mengenai perempuan ya perempuan (Wawancara dengan Esti Susilarti, 11 September 2009).

Dalam rangka persiapan pemilu 2009 Sehati juga mengundang para caleg perempuan di provinsi

DIY untuk diajak berdiskusi dan memberi motivasi kepada mereka. Para caleg diberi keyakinan bahwa mereka layak untuk dipilih:

Ketika Sehati tiba saatnya ngomong pada para caleg perempuan di UMY waktu itu kami juga sadarkan itu. Bagaimana agar mereka *trustable* di mata pemilih. Waktu itu juga mereka sedang patah hati karena mereka merasa dijegal dengan putusan suara terbanyak. Ya memberikan motivasi pada mereka. Kalo memang kita permata di dalam lumpurpun kita permata (*Wawancara dengan Esti Susilarti, 11 September 2009*).

LSM lain yang secara intensif menaruh perhatian pada pendidikan politik adalah Satunama. Sejak tahun 2003 Satu Nama telah melakukan berbagai bentuk pendidikan politik untuk para fungsionaris partai politik maupun kalangan anggota DPRD yang diberi nama Civic Education for Local Politician/CELOP (Wawancara dengan Amiddanal Khusna, 17 September 2009).

CELOP untuk kalangan fungsionaris partai politik pelatihan diberikan selama empat hari dengan materi: pembentukan nilai-nilai, manajemen dan kepemimpinan. Dalam kegiatan ini Satu nama sengaja menghadirkan tokoh-tokoh partai politik untuk membagikan pengalaman mereka kepada para peserta pelatihan (Report on CELOP, Januari 2001: 2–6).

Dalam rangka mempersiapkan Pemilu 2004 Satu nama membekali para alumni CELOP dengan pengetahuan mengenai pemanfaatan media massa untuk sosialisasi program partai dan memenangkan pemilu 2004. Metode yang dipakai adalah andragogi (pendidikan orang dewasa) dengan cara curah gagasan dan diskusi kelompok. Materi yang diberikan meliputi proses komunikasi massa dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta berkampanye dengan memanfaatkan media massa. Materi kedua adalah mengenai radio sebagai salah satu media komunikasi dalam berkampanye. Materi ketiga mengenai etika politik sebagai rambu-rambu dalam berkampanye. Untuk mempraktekkan teori-teori yang telah didapatkan selama pelatihan para peserta diajak untuk berperan sebagai pembicara dalam dialog yang diadakan radio Unisi (Satunama, Report on CELOP Up-Grading 2, Juli 2003: 2–4).

Pelatihan khusus untuk anggota DPRD pernah dilakukan Satunama pada tahun 2001, yaitu untuk anggota DPRD Gunungkidul. Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD dalam membentuk visi sesuai dengan cita-cita yang diinginkan. Hal ini dilakukan karena visi merupakan elemen mendasar dalam kepemimpinan.

Setelah visi terbentuk, para peserta dilatih membuat analisis kondisi riil di Gunungkidul. Fasilitator menjelaskannya dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats). Visi kemudian dikontraskan dengan analisis, sehingga terlihat kesenjangan antara visi dan kondisi riil. Untuk mengatasi kesenjangan itu partisipan dilatih untuk membuat perencanaan program melalui RBM (Result Based Management). Setelah itu semua partisipan berlatih untuk menerapkannya pada masing-masing komisi (Satunama, Report on Workshop II CELOP for DPRD II of Gunungkidul, Oktober, 2001: 2 & 4).

Pada tahun yang sama Satunama juga melakukan pelatihan untuk anggota DPRD Kebumen. Namun berbeda dengan pelatihan yang dilakukan untuk anggota DPRD Gunungkidul, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai fungsi-fungsi anggota DPRD. Mereka dilatih untuk menguasai pengetahuan di bidang legislasi dan perbedaan peran DPRD di masa Orde Lama dan Orde Baru. Dalam pelatihan tersebut juga dihadirkan salah seorang anggota Komisi A di DPRD Provinsi Jawa Tengah yang menuturkan pengalaman-pengalaman sehari-hari berkaitan dengan tugas-tugas sebagai anggota Dewan. Sesi ini menarik antusiasisme peserta untuk menanyakan hal-hal yang bersifat praktis dan teknis (Report on Workshop III, CELOP for DPRD II of Kebumen, November–Desember 2001: 3–5).

## Model Pendidikan Politik Perempuan di Negara Lain

Sebagai pembanding, pengalaman berbagai organisasi perempuan di luar negeri dalam melakukan pendidikan politik patut disimak. Salah satunya adalah Women's Political Resource Center (WPRC) di Georgia yang secara rutin mengadakan pendidikan politik untuk politisi perempuan. Materi pelatihan meliputi 6 modul: (1) hak-hak perempuan dan pendekatan-pendekatan feminis, (2) hubungan dengan publik dan media, (3) kampanye dan penggalangan dana, (4) hak-hak pemilu dan sistem pemilu, (5) administrasi dan pemerintahan daerah, dan (6) kebijakan publik.

Sejak tahun 2005 WPRC mengadakan kursus politik untuk perempuan, terutama berkaitan dengan aspek gender, politik dan hukum. Tujuan dari program ini adalah memberi pemahaman pada perempuan mengenai prinsip-prinsip politik internasional dan keamanan negara. Materi yang diberikan juga mencakup pendekatan-pendekatan

kontemporer untuk memahami isu-isu perempuan dan pengarusutamaan gender di level internasional. Program ini dilakukan selama dua minggu dengan tahapan sebagai berikut. Pertama-tama melalui kuliah umum/seminar peserta secara interaktif diajak untuk memahami dan memiliki kemampuan dan pengetahuan analitis untuk memahami "lokal dalam konteks global" untuk meningkatkan pengetahuan politisi perempuan dalam menyoroti masalah politik di Georgia dalam konteks politik internasional, integrasi Eropa dan keamanan negara. Pendekatan yang sama diterapkan untuk memahami isu-isu gender, termasuk di dalamnya pendekatan yang dilakukan oleh Georgia berkaitan dengan isu-isu perempuan dan pengarusutamaan gender di level internasional. Program ini mempunyai dampak tidak langsung, yaitu memperkuat jaringan politik antarpolitisi perempuan, mempersatukan perempuan dari berbagai daerah dan partai politik berkaitan dengan isu-isu gender ([www.iknowpolitics.org/en/taxonomy/term/184](http://www.iknowpolitics.org/en/taxonomy/term/184), Diakses 3 Juli 2009).

Di kawasan Eropa dan Amerika Latin, salah satu lembaga yang khusus memberikan pendidikan politik untuk para perempuan adalah "Women and Cities" political training center. Lembaga yang berkantor pusat di Barcelona Spanyol dan Buenos Aires ini memiliki misi untuk memperkuat akses perempuan agar dapat memiliki akses ke lembaga pengambil keputusan di tingkat lokal dan mengkonsolidasikan posisi mereka di lembaga-lembaga pengambil keputusan untuk menjamin agar perempuan dapat memberikan pengaruh politik dan agar masyarakat menjadi lebih demokratis.

Dalam pelatihan peserta dibangun kesadaran mereka dengan menengok kembali pengalaman dan sejarah perempuan, serta gerakan perempuan sebagai gerakan politik. Kemudian peserta diajak untuk mempelajari dan mengevaluasi berbagai instrumen di lembaga internasional, nasional dan daerah, universitas dan gerakan perempuan untuk bekerja bersama-sama mewujudkan keadilan gender pada level politik dan menempatkan hak-hak perempuan dalam agenda politik. Mekanisme ini dipandang tepat bagi perempuan agar mereka dapat menyampaikan isu-isu penting di Eropa dan Amerika Latin: bagaimana dengan sukses menggabungkan kehidupan personal dan pekerjaan, melindungi hak-hak seksual dan reproduksi perempuan, dan kekerasan gender. Pengetahuan ini akan memungkinkan perempuan untuk mengembangkan strategi mereka sendiri untuk membuat perubahan politik di organisasi atau institusi mereka masing-masing. Peserta kemudian

diajak fokus pada keterampilan personal dan kolektif dalam politik praktis yang akan dapat meningkatkan pemberdayaan politik perempuan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri dalam situasi di mana hubungan kekuasaan memengaruhi semua hubungan sosial dan pengambilan keputusan ([www.diba.es/urbal12/PDFS/Presentacion\\_Centro\\_Mujer\\_en.pdf](http://www.diba.es/urbal12/PDFS/Presentacion_Centro_Mujer_en.pdf), Diakses 3 Juli 2009).

Di Afrika Selatan sekelompok anggota parlemen yang tergabung dalam Southern African Development Community (SADC) mengembangkan program untuk meraih sensitivitas gender di kalangan anggota laki-laki dan perempuan dan memperkuat kapasitas mereka untuk memahami dan mengartikulasikan isu-isu gender. Kegiatan yang dilakukan adalah membekali anggota parlemen laki-laki dan perempuan dengan ketrampilan analitis gender dan informasi gender. Program ini dirancang untuk melengkapi pelatihan dan pembangunan kapasitas gender di tingkat nasional dan regional bagi pengambil keputusan dan menekankan arti penting peran anggota parlemen dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Titik tekan dari program ini adalah pelatihan dan capacity building gender untuk anggota parlemen laki-laki dan perempuan, dengan perhatian utama pada kebutuhan praktis dan daya tarik strategis anggota parlemen perempuan agar menjadi legislator yang efektif. Materi utama yang dilatihkan meliputi pembangunan kapasitas gender dan pelatihan gender, advokasi gender dan lobby, pengemasan informasi gender untuk anggota parlemen dan dorongan untuk membentuk seksi/desk gender di parlemen ([www.sadc.int](http://www.sadc.int), Diakses 3 Juli 2009).

## Model Alternatif

Upaya pendidikan politik untuk anggota legislatif perempuan belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Tujuan pendidikan politik untuk menjadikan anggota legislatif perempuan memiliki kemampuan yang memadai dalam mengemban misi sebagai wakil rakyat belum tercapai. Sebagaimana ditunjukkan dalam hasil penelitian di DPRD Provinsi DIY, sebagian besar anggota legislatif perempuan lebih banyak bersikap diam selama sidang atau rapat Dewan.

Berkait dengan upaya untuk memperkuat kapasitas politik agar anggota legislatif perempuan memiliki kemampuan dan keberanian untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, maka diperlukan model pendidikan politik alternatif. Materi untuk pendidikan politik alternatif meliputi empat hal: (1) identifikasi masalah-masalah perempuan,

(2) communication skill dan teknik lobbying, (3) peningkatan kepercayaan diri dan (4) membangun jejaring dan kemitraan.

Empat materi pokok tersebut sangat penting diberikan kepada anggota legislatif perempuan dengan pertimbangan-pertimbangan utama sebagai berikut: pertama, berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2007–2008 sebagian besar anggota legislatif perempuan belum sepenuhnya paham mengenai persoalan-persoalan perempuan yang semestinya mereka perjuangkan. Sebagian besar anggota legislatif perempuan yang telah memperjuangkan kepentingan perempuan baru bergerak di seputar isu perempuan praktis (misalnya pemeliharaan kesehatan ibu dan balita, posyandu, pemberian modal untuk kaum perempuan) dan belum memperjuangkan kepentingan perempuan yang sifatnya strategis (misalnya kekerasan terhadap perempuan, akses perempuan di bidang politik, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, atau hak reproduksi agar perempuan memiliki kemandirian untuk menentukan apakah ingin hamil atau tidak, alat kontrasepsi apa yang akan digunakan dan sebagainya).

Kedua, sebagian besar anggota legislatif perempuan kurang memiliki ketrampilan untuk mengemukakan pendapat secara meyakinkan dalam rapat-rapat dewan dan kurang lihai melakukan lobby dengan lembaga eksekutif manakala mereka harus memperjuangkan kepentingan konstituen. Oleh karena itu pelatihan mengenai communication skill dan teknik lobbying sangat diperlukan untuk mendorong agar anggota perempuan dapat dan berani untuk mengemukakan pendapat secara meyakinkan.

Ketiga, sebagian besar anggota legislatif perempuan kurang percaya diri ketika akan mengajukan usul dalam rapat-rapat dewan. Kondisi ini membutuhkan solusi khusus, yaitu pelatihan untuk meningkatkan kepercayaan diri.

Keempat, beberapa media penting yang dapat digunakan para anggota legislatif untuk memperkuat persuasi dan eksistensi mereka, seperti media massa dan organisasi perempuan belum cukup dimanfaatkan. Untuk itu pemahaman arti penting membangun jejaring sangat diperlukan.

Dua materi penting yang sangat penting untuk menunjang tugas pokok sebagai anggota legislatif, yaitu legal drafting dan budgeting sengaja tidak diikutkan, mengingat materi tersebut sudah sangat sering diberikan sebagai materi pokok pendidikan politik yang dilakukan oleh beberapa partai politik dan berbagai LSM perempuan.

Metode penyampaian dilakukan dengan cara pemaparan materi oleh narasumber/pelatih dan

sharing (curah perhatian dan curah gagasan) antar anggota legislatif perempuan, terutama tular pengalaman advokasi di parlemen dan teknik lobbying dari anggota lama kepada anggota baru.

Hasil ujicoba menunjukkan bahwa model pendidikan politik alternatif untuk anggota legislatif perempuan yang dirumuskan oleh penulis membuahkan hasil yang baik. Secara substansial materi yang disampaikan mampu membuka diri para anggota perempuan untuk mengakui kekurangan dan hambatan mereka dalam berkomunikasi dan diikuti dengan komitmen untuk lebih berani berbicara dalam forum persidangan. Para peserta juga telah berhasil merumuskan cara dan strategi masing-masing untuk menyiasati agar usulan mereka dapat diterima dalam persidangan.

## Simpulan

Model-model pendidikan politik yang dilakukan oleh berbagai LSM perempuan dan partai politik selama ini belum menampakkan hasil yang menggembirakan dalam upaya memberdayakan anggota legislatif perempuan. Setidaknya pada periode masa jabatan anggota legislatif 2004–2009 sebagian anggota legislatif perempuan di provinsi DIY belum mampu menjalankan peran sebagai wakil perempuan yang sesungguhnya. Mereka tidak sepenuhnya memahami isu-isu perempuan dan lebih banyak berdiam diri selama persidangan Dewan berlangsung.

LSM-LSM perempuan lebih banyak memusatkan perhatian pada upaya pendidikan politik untuk caleg perempuan dan pemberdayaan politik untuk perempuan kebanyakan. Sementara itu pendidikan politik untuk anggota legislatif perempuan cenderung kurang diperhatikan. Padahal pendidikan politik untuk anggota legislatif perempuan tidak kalah penting untuk dilakukan. Fenomena "membisunya" para anggota legislatif perempuan pada periode 2004–2009 menjadi catatan penting bagi LSM-LSM perempuan untuk mempersiapkan model pendidikan politik yang lebih baik untuk kaum perempuan, khususnya para anggota legislatif perempuan.

Partai-partai politik memiliki kecenderungan serupa. Mereka terlalu sibuk dan mementingkan jumlah caleg perempuan sehingga memenuhi persyaratan untuk lolos menjadi partai peserta pemilu. Sesungguhnya hal yang lebih penting untuk diperhatikan adalah mendapatkan perempuan berkualitas yang memiliki kemampuan politik

yang handal. Selama ini hiruk pikuk upaya partai politik dalam memberdayakan kader perempuan terkonsentrasi selama masa pemilu. Begitu pemilu telah usai partai cenderung abai dalam melakukan kewajiban melakukan pendidikan politik, sebuah aktivitas yang seharusnya menjadi tugas utama partai politik dan cenderung menyerahkannya kepada lembaga lain.

Model yang disajikan dalam tulisan ini setidaknya bisa menjadi model alternatif untuk memperbaiki model-model pendidikan politik untuk perempuan yang pernah dilakukan di berbagai tempat. Terutama bagi anggota legislatif perempuan, model alternatif ini diharapkan dapat memperbaiki kapasitas politik anggota legislatif perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.

## Daftar Pustaka

- Advancing Democracy (2009) [Diakses 9 Juni 2009] [www.iri.org/asia/indonesia.asp](http://www.iri.org/asia/indonesia.asp).
- Agustin, R (2009) Wawancara dengan penulis pada 24 Juni 2009.
- Astuti, D (2008) Wawancara dengan penulis pada 3 Juni 2008.
- Dewi, MA & Ilkodar, SB (2008) Implikasi Peningkatan Keterwakilan Perempuan bagi Pemenuhan Kepentingan Perempuan (Studi pada DPRD Provinsi DIY). *Masyarakat Kebudayaan dan Politik* 21(1): 98–99.
- Gender and Women's Participation in Indonesia (2009) [Diakses 6 Mei 2009] [asiafoundation.org/publications/pdf/263](http://asiafoundation.org/publications/pdf/263).
- Hadiyanah, S (2008) Wawancara dengan penulis pada 1 Agustus 2008.
- Khusna, A (2009) Wawancara dengan penulis pada 17 September 2009.
- KPI DIY (2004) Laporan Pertanggungjawaban KPI DIY.
- KPI DIY (2004) Laporan Pendidikan pemilih dan lokakarya temu caleg dan pemilih perempuan di DIY.
- Lestari, AS (2008) Wawancara dengan penulis pada 30 Mei 2008.
- Majmu'ah, S (2008) Wawancara dengan penulis pada 20 Juni 2008.
- Nuraini, D (2008) Wawancara dengan penulis pada 23 Juli 2008.
- Political Education Programme for Women in Cooperation with WPRC (2009) [Diakses 3 Juli 2009] [www.iknowpolitics.org/en/taxonomy/term/184](http://www.iknowpolitics.org/en/taxonomy/term/184).
- Programmes in SADC (2009) (Diakses 3 Juli 2009] [www.sadc.int](http://www.sadc.int).
- Satunama (2001) Report on CELOP.
- Satunama (2001) Report on Workshop II CELOP for DPRD II of Gunungkidul, Oktober.
- Satunama (2001) Report on Workshop III, CELOP for DPRD II of Kebumen, November–Desember.

Satunama (2003) Report on CELOP Up-Grading.

Siregar, WZ (2007) Responses of Muslimat and Fatayat to the Quota for Women in the 2004 Election. *Masyarakat Kebudayaan dan Politik* 20(4): 325.

South Dakota Lieutenant Governor Conduct Women in Politics Training (2009) [Diakses 9 Juni 2009] [http://](http://www.data%20penguatan%20keppol/2009-09-03-Indonesia,asp-iri.htm)

[www.data%20penguatan%20keppol/2009-09-03-Indonesia,asp-iri.htm](http://www.data%20penguatan%20keppol/2009-09-03-Indonesia,asp-iri.htm).

Susilarti, E (2009) Wawancara dengan penulis pada 11 September 2009.

Women and Cities Political Training Center (2009) [Diakses 3 Juli 2009] [www.diba.es/urbal12/PDFS/Presentacion\\_Centro\\_Mujer\\_en.pdf](http://www.diba.es/urbal12/PDFS/Presentacion_Centro_Mujer_en.pdf).